

## STRATEGI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

*Fernando S. Solang<sup>1</sup>*  
*J.E. Kaawoan<sup>2</sup>*  
*Ismail Sumampow<sup>3</sup>*

### Abstrak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang bergerak di berbagai bidang usaha yang memainkan peranan penting terhadap masyarakat, dikarenakan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Peran UKM untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari: Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan usaha lokal dan pemberdayaan masyarakat dan sumber inovasi. Pemerintah Daerah dalam mewujudkan iklim yang baik untuk UMKM belum sepenuhnya terwujud dilihat dari strategi serta penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak terhadap UMKM sehingga pelaku UMKM terhambat pada pemasaran produk serta hambatan finansial masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal sehingga Pemerintah Daerah belum bisa memberikan bantuan modal serta alat-alat yang dapat di gunakan oleh para pelaku-pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM mencari modal dan alat sendiri agar dapat bertahan. Selain itu permasalahan juga datang dari UMKM berkaitan dengan pengelolaan yang kurang profesional, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan SDM yang terampil yang dimiliki UMKM sehingga pemerintah yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan seharusnya bekerjasama dengan pihak swasta memberikan pelatihan kepada UMKM agar bisa bertahan, juga agar usaha mereka dapat berkembang di kemudian harinya. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dinas koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa Selatan terhadap kemandirian UMKM di Minahasa Selatan. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

**Kata Kunci : Peremberdayaan, Usaha Kecil, Menengah.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Peluang pengembangan UKM di Kabupaten Minahasa Selatan sangat terbuka mengingat perkembangan begitu pesatnya perkembangan ekonomi serta infrastruktur dalam 5 tahun terakhir. Ditambah dengan adanya pelabuhan baru di Minahasa Selatan semakin menambah jumlah pendatang yang datang di Minahasa Selatan. Melihat potensi yang begitu besar akan perkembangan usaha-usaha kecil menengah di Kabupaten Minahasa Selatan diperlukan strategi yang baik untuk mengoptimalkan peran UKM dalam untuk kesejahteraan masyarakat, sejauh ini telah ada beberapa program dari Dinas Koperasi dan UKM adalah pelaksanaan edisi ke-3 Gebyar UKM yang dilaksanakan tahun 2018, simpan pinjam, ultra mikro dan lainnya. Kiranya dapat menunjang usaha-usaha kecil Dan menyemangati pelaku-pelaku usaha, yang butuh bantuan-bantuan. "Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Koperasi UKM di Ramayana Ballet Kompleks Candi Prambanan meraih prestasi yang luar biasa peringkat 1 OPD Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Koperasi dan UMKM tunggal terbaik. ini, diharapkan dapat memacu dan menggairahkan koperasi dan UMKM di Minahasa Selatan. Apalagai tahun ini, akan dibangun rumah ole-ole yang dikelola UMKM. Rumah ole-ole ini, nantinya akan dilengkapi dengan teknologi alat packing dan label di Kabupaten Minahasa Selatan yang tujuannya untuk mendorong pengembangan dan kemajuan UKM di Kabupaten Minahasa Selatan. Kita semua berharap melalui ajang strategis ini , dapat

membuka peluang yang seluas-luasnya bagi seluruh pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya. Karena lewat usaha ini, kita berkesempatan untuk mendapatkan bimbingan dan arahan langsung dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Minahasa Selatan memiliki program dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang salah satunya telah tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang meningkat modal usahanya.
2. Mewujudkan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berprestasi.
3. Mewujudkan pertumbuhan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM)
4. Mewujudkan kemitraan UKM dan SDM Pengelola Koperasi yang berkualitas

Koperasi sangat penting demi kemajuan perekonomian daerah. Dengan berbagai program koperasi seperti simpan pinjam, ultra mikro dan lainnya, kiranya dapat menunjang usaha-usaha kecil. Dan menyemangati pelaku-pelaku usaha, yang butuh bantuan-bantuan. "Penghargaan ini, diharapkan dapat memacu dan menggairahkan koperasi dan UMKM di Minahasa Selatan. Apalagai tahun ini, akan dibangun rumah ole-ole yang dikelola UMKM. Rumah ole-ole ini, nantinya akan dilengkapi dengan teknologi alat packing dan label. Pemerintah dalam kebijakannya terhadap UKM dengan mengeluarkan payung hukum yaitu:

1. Pancasila yaitu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. UUD 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan

demokrasi ekonomi sesuai pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 27 ayat 2 dan pasal 33.

3. Ketetapan MPR RI nomor XVI/MPR RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah.
4. Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil.
5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

Kebijakan pemerintah tersebut diatas dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pembinaan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan dan pengembangan seluasluasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro, kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam upaya pemberdayaan UMKM telah menjalin kerjasama dengan kementerian dan instansi-instansi terkait demi mengembangkan UMKM dan dunia usaha yang digeluti. Upaya kerjasama dilakukan PEMDA dengan Kementerian UMKM demi penguatan basis-basis desa produksi pertanian (tanaman pangan) dengan berbagai penunjang fasilitas. Pemerintah Daerah juga melakukan kerjasama dengan Telekomunikasi seperti Telkom untuk menyiapkan perangkat jaringan Telkom untuk kawasan agropolitan Modinding. Kadis Pariwisata dan

Kebudayaan Drs Sonny Maleke, Camat Modinding Elsy Mekar, S.Pd dan seluruh Hukum Tua serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Modinding.

Namun keberadaan dari UKM ini bukan berarti tanpa masalah. Menurut data awal yang peneliti dapatkan dari Bidang UKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa Selatan, permasalahan UKM berkaitan dengan kurangnya sumberdaya pegawai dinas, permodalan, pemasaran, pengelolaan yang kurang profesional. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki pelaku UKM. Melihat permasalahan yang dihadapi UKM tersebut, dibutuhkan peran dari pemerintah daerah yaitu dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa Selatan yang berkewajiban untuk turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat. Selain permasalahan teknis juga dikarenakan UKM ini masih belum bisa bersaing secara kompetitif dengan para pelaku ekonomi lainnya. Beberapa persoalan yang di hadapi UKM sehingga sulit berkembang antara lain :

1. Ketidakmampuan dalam manajemen;
2. Lemahnya kemampuan dalam pengambilan keputusan;
3. Kurang berpengalaman;
4. Lemahnya pengawasan keuangan;
5. Kurangnya penyuluhan kepada para pelaku UKM

Sejalan dengan itu maka besarnya UMKM membawa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan terutama dari sisi dampak yang ditimbulkan yaitu kerusakan lingkungan. Oleh karena itu maka kendali UMKM cukup penting dalam rangka penanaman modal di daerah melalui aspek proses perizinan

yang selama ini masih menjadi masalah diantaranya disebabkan oleh :

- a. Kesulitan investor dalam mencari lokasi yang strategis yang salah satu penyebabnya adalah daerah belum memiliki database yang valid dan akurat sebagai parameter untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan penentuan lokasi dan penanaman modal. Disamping itu belum tersedianya rencana detail atau teknis tata ruang sebagai penjabaran kebijakan rencana tata ruang RT, RW. Disamping itu penentuan lokasi harus sesuai dengan persyaratan industri, harga tanah yang berlaku sudah terlalu mahal dan tidak terjangkau untuk skala industri.
- b. Kendala terhadap pelayanan terhadap pengurusan Izin yang terkadang prosedurnya berbelit-belit waktu lama dan tak memiliki standar. Hal ini dimungkinkan pula terjadi karena kurangnya pemahaman investor dalam pengurusan perizinan. Selain itu adanya persyaratan tambahan pemerintah daerah melalui pemberian izin prinsip. Hal lain karena pengurusan perizinan harus melalui banyak lembaga misalnya (Kantor Pertanahan, Dinas PU, Dinas Tata Kota, kehutanan, kebebasan lahan). Apabila kegiatan UKM itu merupakan lintas kabupaten dan kota maka pengaturan perizinan biasanya tidak ada koordinasi antara kabupaten dan propinsi yang berimplikasi terhadap sulitnya atau berbelit-belitnya dalam bidang perizinan. Berdasarkan uraian di atas adalah menarik untuk dilakukan penelitian dengan alasan bahwa ternyata implementasi wewenang daerah

sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek 1, diantaranya aspek sumber daya manusia, aspek 2, dukungan sumberdaya alam dan aspek 3, kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah termasuk pengelolaan UKM daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut.

## Tinjauan Pustaka

Menurut Handoko (2009:141). yang menyatakan bahwa perencanaan strategik (strategic planning) adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi ; penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut ; dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan.

Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut. Contoh berikut menggambarkan perbedaanya, “strategi untuk menangkan keseluruhan kejuaraan dengan taktik untuk memenangkan satu pertandingan”. Pada awalnya kata ini di pergunakan untuk kepentingan militer saja tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti strategis bisnis, olahraga (misalnya sepak bola dan tenis), catur, ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategi, dll. Skinner (dalam Akdon 2009:4). Menurut Rudjito. (2003:3). bahwa pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik

dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

Menurut Said dan Widjaja. 2007:1. Koperasi dan UKM Mmemberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan.

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari “empowerment” menurut sarjana lain, pada intinya diartikan sebagai berikut. “ membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan social dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan.” (Baridi2005:3)

Konsep pemberdayaan yang dilakukan bertujuan pada pemberdayaan bidang ekonomi dan bidang sosial, dengan maksud kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil dan agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang mmungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang didalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian

ketahanan ekonomi nasional (Rukminto Bachtiar, 2008:7).

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode penelitian Kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu untuk mengelola data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dimana datanya berupa kata, kalimat, skema atau gambar. Dengan mengacu pada konsep yang digunakan, yaitu untuk mengetahui dan memahami strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pemberdayaan usaha kecil menengah masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2015:112), objek dalam penelitian ini kualitatif adalah objek yang alamiah atau objek yang apa adanya dan tidak di manipulasi oleh peneliti.

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Januari 2019 di mulai pada saat pengambilan data pertama mengenai sejarah, strategi dan gambaran umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sampai selesai untuk pengambilan sampel dari para pelaku UKM.

Fokus penelitian yaitu bagaimana Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Memberdayakan Usaha Kecil Menengah Masyarakat di Minahasa

Selatan agar supaya pelaku-pelaku UKM dapat terus mengembangkan setiap usaha masing-masing pelaku UKM.

Handoko (2009:141) Menyatakan bahwa perencanaan strategik (strategic planning) adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Minahasa Selatan
2. Pelaku UKM : 2 Orang
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4. Kepala bidang UKM

## Hasil Penelitian

Strategi pencapaian tujuan merupakan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor yang sangat penting dalam proses perencanaan strategis.

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan program. Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait dan ditetapkan untuk menjadi pedoman,

pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Kemudian, kegiatan yang ingin dilaksanakan dalam tiap tahun akan dijelaskan dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa Selatan telah dibelakali dengan dana yang berasal dari APBD Kabupaten Minahasa Selatan yang tertata untuk tahun anggaran 2017-2021. Adapun untuk menunjang kegiatan bidang UKM tahun 2018 sebesar Rp. 7.315.000.000, pengembangan kewirausahaan sebesar Rp. 2.310.000.000, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah sebesar Rp. 3.025.000.000. data tersebut peneliti dapatkan dari hasil data sekunder yakni Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam rangka memajukan pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Minahasa Selatan, dinas koperasi dan ukm juga berperan memberikan bantuan berupa dana untuk memfasilitasi pengembangan UKM. Untuk tahun 2018 total dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 1.650.000.000 yang dialokasikan untuk 354 usaha UKM di Kabupaten Minahasa Selatan dan pada tahun 2019 sebesar 1.815.000.000,- dan ditargetkan meningkat pada setiap tahunnya. Kabupaten Minahasa Selatan memiliki

potensi untuk melaksanakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam rangka penanaman modal karena ditunjang dengan jumlah UKM yang ada serta berbagai bidang/jenis usaha yang dapat dimitirakan sesuai Keppres No. 127 Tahun 2001. Oleh karena itu peran Pemerintah Daerah terhadap UKM sangatlah penting karena dengan adanya UKM dapat membantu perekonomian suatu daerah. Program penanaman modal melalui kemitraan sebagai salah satu upaya pemberdayaan bagi UKM di Minahasa Selatan belum optimal karena dihadapkan dengan berbagai kendala selain faktor hukum perundangundangan, peraturan-peraturan daerah, dan lain-lain sehingga yang ada yang saat ini terkesan masih menjadi faktor penghambat masuknya investor untuk menanamkan modalnya di sektor UKM tersebut.

Dari hasil penelitian melalui data sekunder, peneliti mendapatkan Evaluasi hasil pemberdayaan dan pembinaan UKM di Kabupaten Minahasa Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2010 – 2015, masih ditemukannya permasalahan UKM yang belum tuntas, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia,  
Kualitas sumber daya manusia UKM masih banyak yang belum mempunyai pandangan luas dan modern khususnya dalam hal manajemen dan meningkatkan kualitas produk serta pengembangan usahanya sehingga masih memerlukan dorongan dan fasilitasi dari Pemerintah yang berupa diklat teknis maupun manajemen.
2. Permodalan,  
Kurangnya permodalan masih dirasakan oleh pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya, sehingga suntikan dana baik melalui perbankan maupun bantuan Pemerintah masih sangat diharapkan.
3. Pemasaran,

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.*

*Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

Permasalahan jaringan pemasaran produk UKM masih terbatas dan sangat tergantung dengan kualitas produk yang dihasilkan.

Ada beberapa faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi tercapainya pelaksanaan program pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa Selatan, antara lain :

- a. Mayoritas UKM bergerak dalam sektor informal tanpa dukungan perijinan usaha sehingga UMKM sulit bersaing dalam mekanisme pasar.
- b. Terbatasnya akses UKM terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar.
- c. Kurang tumbuhnya penciptaan wirausaha baru disebabkan pola pikir dan peluang usaha terhadap jiwa kewirausahaan masih rendah.
- d. Masih rendahnya kompetensi para pengelola UKM.
- e. Kecintaan masyarakat terhadap produk daerah sendiri masih kurang.

## **Kesimpulan**

1. Strategi Pemberdayaan bagi pelaku UKM oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah telah terprogram melalui rencana strategi dinas tahun 2016-2021, dari situ telah tergambar jelas perencanaan dan langkah strategi dinas dalam pemberdayaan pelaku UKM.
2. Program pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka pengembangan UKM berjalan dengan baik dimana terlihat adanya beberapa program

seperti Gebyar UKM Indonesia tahun 2018 di Minahasa Selatan, program peminjaman modal usaha dan program pelatihan dan pembimbingan usaha yang bekerjasama dengan kementerian Koperasi dan UKM

3. Masih kurangnya jumlah pegawai yang bekerja mengimplementasi program dan kurangnya sarana prasarana pendukung di Dinas Koperasi dan UMKM Minahasa selatan menjadi salah satu kelemahan dalam pemberdayaan pelaku UKM

## Saran

1. Dalam rangka mewujudkan pengembangan usaha kecil menengah di Kabupaten Minahasa Selatan Disarankan kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Koperasi dan UMKM untuk giat mencari investor untuk mengembangkan beberapa sector yang menjadi daya Tarik daerah lain serta wisatawan seperti sector wisata, supermarket, dengan demikian banyak akan tumbuh pelaku-pelaku usaha baru yang mampu mengangkat perekonomian daerah.
2. Dalam membantu pelaku usaha UKM, Dinas Koperasi dan UMKM sebaiknya mengembangkan terus pelatihan bagi pelaku usaha pemula dengan bekerja sama dengan beberapa pengusaha sukses dalam melakukan pelatihan, seminar yang mampu menambah pengetahuan pelaku usaha serta merangsang calon pengusaha untuk berani membuat usaha, selain itu perlu juga komitmen pemerintah daerah dalam mengucurkan dana tambahan

untuk peminjaman modal usaha yang dikelola secara profesional.

3. Perlu adanya penambahan pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM Minahasa selatan yang menjadi salah satu kelemahan dalam pemberdayaan pelaku UKM, selain itu juga pimpinan dinas perlu memperhatikan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang dalam pekerjaan pegawai seperti ruangan kerja yang representative dan kondusif serta ketersediaan kertas, tinta, computer dan alat tulis kantor lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Raselawati. 2011. Pengaruh Perkembangan UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Di Indonesia.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Adi, M. Kwartono. 2007. Analisis Usaha Kecil Dan Menengah, Penerbit CV.Andi Offset, Yogyakarta
- Agus, Santoso. 2008. Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Kecil Menengah. Studi Kasus di UKM Kambing Desa Cikarawang Kecamatan Darmaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
- Akdon. 2009. Strategic Management For Education Management (Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan). Bandung: Alfabeta.
- Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta

- Barata, Atep Adya. 2004. Dasar – Dasar Pelayanan Prima. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Baridi B, Muhammad Zein, M. Hudri, 2005. Zakat Dan Wirausaha. Jakarta: CED
- David, Fred R, 2011. Strategic Management, Buku 1. Edisi 12 Jakarta
- Erik, Dian Purnomo. 2013. Tinjauan Yuridis Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
- Handoko, T. Hani. 2009. Manajemen. Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA.  
<http://indonesiainancetoday.com>, diakses pada 2 September 2013.  
Laporan Kajian Industri Prioritas. Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2011 Laporan Perkembangan Kemajuan Program Kerja Kementerian Perindustrian 2004-2012. Departemen Perindustrian. 2013
- Hendri, Ma'ruf, 2006, Pemasaran Ritel, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Henry Simamora, 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi 1. Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.
- Miles, M. B. dan Huberman, M. A. 2008. "Qualitative Data Analysis".
- Noor, Ida R., Setyawati, Lugina. 2010. Pemberdayaan UKM: Catatan Refleksi Hasil Meta Riset. Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 15, No. 1, Januari 2010 : 39-58. Jakarta, Labsosio FISIP-UI
- Rudjito. 2003. Strategi Pengembangan Umkm Berbasis Strategi Bisnis, Makalah Yang Di Sampaikan Pada Seminar Peran Perbankan Dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional Kerjasama Lemhanas RI Dengan BRI.
- Rukminto, Bachtiar. 2008. Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat. (Online). [www.ejournal.unair.ac.id](http://www.ejournal.unair.ac.id). Diakses pada tahun 2014
- Ruslan, Rosadi, 2010, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations, Edisi Revisi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosmedi Dan Riza Risyanti, Pemberdayaan Masyarakat, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006
- Said A K dan Wijaya C. 2005. Riset Keuangan : Pengujian Pengujian Empiris. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sumodingningrat. 2004. Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.
- Tjejep Rohendi. 2008. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Tribun Manado. 2018. Gebyar UKM Minahasa Selatan untuk kemajuan usaha, 10 Oktober
- Fandy Tjiptono. 2006. Manajemen Jasa. Edisi Pertama. Yogyakarta : Andi
- Santoso Agus 2008. Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus di UKM Kambing Desa Cikarawang

Kecamatan Darmaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)  
Purnomo Dian Erik 2013. Tinjauan Yuridis Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Raselawati Ade 2011. Pengaruh Perkembangan UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM di Indonesia  
UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah

